

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PUBLIC PERCEPTION ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION CURRICULUM

Sutjipto

**Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud
Jl. Gunung Sahari Raya, Nomor 4A, Jakarta Pusat
e-mail: sutjipto.55@gmail.com**

Naskah diterima tanggal: 11/01/2015, Direvisi akhir tanggal: 18/02/2015, disetujui tanggal: 23/02/2015

Abstract: *The purpose of this study is to obtain public perceptions of early childhood education curriculum. The study used a case study approach with positivistic research paradigm and conducted from September to November 2014. Data analysis was performed using simple descriptive analysis in the form of a narrative. The results shows that the issue of curriculum and its implementation is not just the domain of curriculum developers, but also other aspects perceived as significant issues by the community. First, public perceives the importance of the rational of development, the cornerstone of development, strategy and procedure of development, structure and content of the curriculum, implementation strategies, and the existence of books and equipment in the context of curriculum design. Second, regarding the presence of the developed early childhood education curriculum, society strongly perceives that the document has been considering various aspects to the growing of interest for early childhood in practice of reading, writing, speaking, socializing/making friends, eating and drinking together, discipline, manners, faith, and playing activities, singing, marching, and exercise. Third, the implementation of the curriculum is perceived by society as an in need of harmonies cooperation among educational institutions, public, and educational supervisors in the region, especially in terms of teaching staff, procurement of books and equipment and other support resources.*

Keywords: *public perception, perception of curriculum, early childhood education*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh persepsi masyarakat terhadap kurikulum pendidikan anak usia dini. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan paradigma penelitian positivistik, dan dilakukan pada bulan September sampai November 2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif sederhana dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu kurikulum dan penerapannya tidak hanya ranah pengembang kurikulum melainkan juga beberapa hal dipersepsikan secara cukup signifikan oleh masyarakat. Pertama, masyarakat mempersepsi penting terhadap rasional pengembangan, landasan pengembangan, strategi dan prosedur pengembangan, struktur dan isi kurikulum, strategi implementasi, dan keberadaan buku dan peralatan dalam konteks desain kurikulum. Kedua, berkaitan dengan kurikulum pendidikan anak usia dini yang dikembangkan, masyarakat mempersepsi secara kuat bahwa dokumen tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan untuk tumbuh kembangnya anak usia dini dalam berlatih membaca, menulis, berbahasa, bersosialisasi/berteman, makan dan minum bersama, berdisiplin, bertata krama, sopan santun, aqidah keimanan, kegiatan bermain, bernyanyi, baris-berbaris, dan berolahraga. Ketiga, pengimplementasian kurikulum dipersepsi oleh masyarakat sangat memerlukan kerja sama yang harmonis antara lembaga pendidikan, masyarakat dan pembina pendidikan di daerah terutama dalam hal tenaga pendidik, pengadaan buku dan peralatan serta sumber daya pendukung lainnya.*

Kata kunci: *persepsi masyarakat, persepsi terhadap kurikulum, pendidikan anak usia dini*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan kumpulan dari masyarakat yang memiliki keanekaragaman latar belakang baik agama, suku, golongan, budaya maupun pranata sosial yang membentuk sebuah sistem identitas diri dan integrasi sosial, atas dasar kesamaan sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Adanya kesamaan sikap karena orang menginginkan hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, yang dinamakan negara. Merujuk pendapat Gamble (1988) yang menyatakan bahwa negara didirikan atas dasar persamaan semua warga negara, maka negara tidak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir tertentu bersama, seperti penjamin aturan pasar agar setiap individu dapat mengejar kebutuhannya, penjamin pendidikan agar setiap individu bisa bersekolah, melainkan juga merupakan puncak dari sistem sosial, di mana nilai tertinggi bukan pada individu melainkan pada kehidupan bersama.

Dengan adanya perasaan kehidupan bersama, bukan dikarenakan warna kepentingan politik, melainkan adanya perbuatan sosiologis dalam berbagai khasanah kehidupan, seperti dalam pengembangan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), kesehatan masyarakat dan keagamaan. Perbuatan sosiologis pada masyarakat untuk PAUD dapat diupayakan melalui interaksi tingkah laku di antara individu-individu yang berada dalam masyarakat yang bersinggungan dengan lembaga pendidikan dan dipandu secara terorganisasi dan bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Sejalan dengan pengertian tersebut, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat akan terikat oleh kebiasaannya yang terlihat wujudnya dalam berbagai tata kelakuan (*mores*) sosial dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku mereka (Geertz, 1973).

Dalam kenyataan, kepedulian masyarakat terhadap pengembangan lembaga PAUD sebagai manifestasi dinamika budaya masyarakat tidak selamanya berjalan mulus. Satu sisi, permasalahan silang pendapat dalam masyarakat majemuk (*plural society*) sering kali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan pengetahuan, status sosial, geografis, dan adat kebiasaan menjadi kendala bagi tercapainya suatu kesepakatan yang perlu ditaati secara bersama. Pada sisi yang lain, masyarakat juga mempertanyakan seberapa besar elemen PAUD memiliki fungsi dan memberi sumbangan bagi upaya membangun harmoni dan memecahkan masalah kehidupan masyarakat itu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Maliki (2008) bahwa pendidikan sebagai elemen dalam masyarakat harus memiliki sumbangan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dan membantu menciptakan keseimbangan.

Berkaitan dengan pendidikan, masih banyak kenyataan yang terjadi pada masyarakat, seperti adanya anggapan sebagian besar orangtua yang mempunyai pola pikir bahwa PAUD itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, yayasan dan pihak lembaga penyelenggara pendidikan semata. Karenanya, sering dijumpai orangtua menumpu harapan terlalu tinggi pada lembaga penyelenggara PAUD sehingga menuntut lembaga tersebut berbuat seperti yang dikehendakinya. Padahal, secara jelas pada Pasal 4, Ayat (6) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Peran serta yang dimaksud bisa dalam hal pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengawasan, dan pemberian dukungan sumber daya yang diperlukan oleh penyelenggara PAUD.

Masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap PAUD akan sangat antusias

untuk bahu-membahu dalam mengembangkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Di masa yang akan datang peran sosial masyarakat seperti itu akan berkontribusi positif terhadap konfigurasi kepribadian dan norma etik anak khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian Jenkins (2014) memberi gambaran bahwa secara jangka panjang manfaat sosial dari investasi sumber daya pada anak usia dini adalah memberi kesempatan yang kuat untuk kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Bagi masyarakat Indonesia, temuan studi tersebut di samping sebagai rujukan untuk mengelola PAUD menjadi lebih baik, juga menjadi tantangan yang harus diatasi, yakni bagaimana meningkatkan peran masyarakat bagi tumbuh kembangnya lembaga pendidikan.

Permasalahan berikutnya, jumlah anak dengan usia 0-6 tahun sangat besar, yaitu sekitar 30 juta anak. Namun, realita tersebut tidak sebangun dengan telah dibangunnya lembaga penyelenggara PAUD di negeri ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, layanan PAUD di Indonesia menjangkau sekitar 30% dari 30 juta anak usia 0-6 tahun dari target yang disepakati dengan UNESCO, yakni 75% pada tahun 2015 (BKKBN, 2014). Banyaknya anak yang belum terjangkau layanan PAUD menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk itu, ketiganya kini perlu saling bersinergi guna membangun dan mengembangkan PAUD berbasis masyarakat. Dengan demikian, pada gilirannya akan dapat mewujudkan keberadaan lembaga PAUD yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman potensi sumber daya, kebutuhan daerah, kebutuhan peserta didik, dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah seberapa baik komponen-komponen pendukung penyelenggaraan PAUD. Komponen-komponen tersebut antara lain seperti desain kurikulum, bahan ajar, sumber daya manusia terutama tenaga pendidik dan pengasuh,

kelengkapan sarana dan prasarana, lingkungan belajar (lingkungan sekolah, penataan kelas, penataan halaman sekolah, dan penataan berbagai jenis alat permainan), dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk PAUD, komponen kurikulum menempati posisi yang sangat penting karena diyakini bahwa pengembangan kurikulum berhubungan dengan mutu program pembelajaran secara keseluruhan (Bredecamp dan Copple, 1997). Sementara itu, program pembelajaran yang dirancang akan berdampak terhadap performa peserta didik yang ingin dihasilkan dari suatu sistem penyelenggaraan PAUD yang dikehendaki oleh lingkungan dan masyarakat. Misalnya, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, menolong para orang tua dan anak-anak menjadi individu yang terdidik, dan memberikan ruang kesadaran baru kepada masyarakat bahwa PAUD masih menunggu peran serta mereka.

Pada tahun 2012 Pemerintah menargetkan program satu desa satu PAUD, dengan diiringi himbauan agar seluruh elemen masyarakat turut menyukseskan kebijakan tersebut. Dampak kebijakan itu ternyata cukup signifikan. Terbukti pada tahun 2011 tercatat sebanyak 30.355 desa yang belum memiliki PAUD, dan pada tahun 2012, angka ini berhasil ditekan menjadi sebanyak 26.174 desa (<http://www.jurnas.com/news/114685/>). Capaian tersebut memberi gambaran bahwa pada jenis-jenis kebijakan seperti itu, Pemerintah akan memegang peranan yang paling penting karena berkaitan dengan kebijakan politik bangsa (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2012). Dampak hasil tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa masyarakat cukup berperan sebagai katup pengaman sukses tidaknya suatu kebijakan.

Dalam kesuksesan maupun ketidaksuksesan program PAUD terdapat beberapa pertanyaan implementatif yang harus dijawab: 1) siapakah pemegang kunci sukses terpenting dalam pelaksanaan lembaga PAUD?, 2) seberapa kuat peran masyarakat turut serta dalam

menyukkseskan keberadaan lembaga PAUD?, 3) apakah kontribusi masyarakat yang signifikan terhadap kelangsungan PAUD?, 4) siapakah yang menentukan sukses tidaknya PAUD?, 5) bagaimana persepsi masyarakat terhadap PAUD?, 6) bagaimana persepsi masyarakat terhadap kurikulum PAUD?, 7) bagaimana persepsi masyarakat mengenai pengasuhan anak usia dini?, dan 8) bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang pendampingan terhadap anak usia dini?.

Atas dasar berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini akan meneliti satu di antara permasalahan tersebut, yaitu Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kurikulum PAUD. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kurikulum PAUD. Di samping pengalaman dalam mengenali data atau fakta tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan program PAUD ditinjau dari sisi persepsi masyarakat terhadap suatu terminologi kurikulum, di masa yang akan datang memperoleh input berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan serupa.

Kajian Literatur

Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat merupakan padanan dari kata *society*, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Latin *societas* yang berarti "kawan". Masyarakat, menurut Schaefer dan Robert (1998) adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sejumlah orang tersebut setiap hari berinteraksi secara sosial dan berkomunikasi dalam kehidupan, saling bekerja sama, dan memiliki wadah organisasi ke-masyarakatan secara teratur.

Masyarakat, menurut Ahmadi (2007) terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang hidup secara kolektif dengan pengertian-pengertian

dan tanggapan yang kolektif pula. Koentjaraningrat (1994), menyatakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif di mana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Sementara itu, Maclonis (1997) menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

Dari empat pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu karena merasa ada kesamaan kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan persatuan serta harapan dan nilai-nilai yang diikuti oleh warganya. Hidup dalam kelompok seperti itu, seorang individu akan belajar pola-pola tindakan bersama pada saat berinteraksi dengan segala macam atribut individu di sekelilingnya sebagai dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai akibat hidup bersama, timbul sistem komunikasi untuk saling memengaruhi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar-individu karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya sehingga timbul suatu kesadaran untuk saling membutuhkan di antara mereka.

Adanya interaksi dalam hubungan sosial dalam masyarakat dapat membentuk kebiasaan, aturan adat dan hukum. Aturan-aturan ini dapat menghasilkan suatu keteraturan sosial dan menghindarkan perilaku menyimpang di antara para individu dan kelompok sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan begitu, di masyarakat banyak dijumpai ikatan kesatuan sosial masyarakat, baik yang formal maupun nonformal, seperti organisasi rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), paguyuban, masyarakat pendatang, masyarakat petani, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat peduli pendidikan, komite sekolah, masyarakat dengan suku tertentu, dan lain sebagainya. Ikatan dalam wadah kesatuan sosial

terjadi karena adanya suatu sistem yang mengikat kehidupan dan adanya pembagian peran dan tugas pekerjaan dalam masyarakat.

Timbulnya berbagai bentuk masyarakat seperti dikemukakan di atas karena orang-orang tersebut merasa memiliki kesadaran bersama dalam kehidupan, kepentingan, harapan, budaya, dan ikatan kekeluargaan. Merujuk pendapat Waters (1994), manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, ikatan kebersamaan dalam masyarakat lazimnya bukan diarahkan pada *konformisme* liyan (*the other*), tetapi lebih pada totalitas perilaku yang mencerminkan kehendak kehidupan yang dicita-citakan masyarakat yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai ciri khas kebersamaan. Dengan demikian, perilaku seperti saling membantu antaranggota, menjenguk warga yang sedang sakit, beribadah bersama di tempat ibadah, turut memberi sumbangan bagi warga yang terkena musibah, turut terlibat secara aktif dalam memajukan PAUD, dan memiliki hubungan yang lebih mendalam merupakan faktor penentu kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Pengertian Persepsi

Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses mengenali atau memahami objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989). Untuk memahami konteks informasi, seseorang menggunakan daya pikir dan nalarnya. Hasil studi Richeimer (2006) menemukan bahwa persepsi menyembunyikan fenomena empiris yang mapan yang dikenal dengan istilah sebagai '*keakraban*'. Temuan studi ini memberi makna bahwa apabila seseorang akan mempersepsi sesuatu objek, baik orang maupun bukan orang maka seseorang itu sangat akrab dan peka dengan fungsi data.

Persepsi menurut Kotler dan Keller (2005) adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi merupakan

hasil proses kerja otak seseorang dalam memahami atau menilai tentang objek, peristiwa, aspek, atau hubungan-hubungan yang terjadi di sekitarnya (Walgito, 2004; Suharman, 2005; Waidi, 2006; Rakhmat, 2007; Sugihartono, Kartika, Farida, Farida dan Siti, 2007).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses kemampuan seseorang mengorganisir pemahamannya dalam arti membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, menelaah, dan menginterpretasikan sesuatu objek tertentu guna menciptakan gambaran secara keseluruhan.

Berdasarkan penelaahan di atas, persepsi masyarakat dalam artikel ini dimaknakan sebagai pemahaman dalam arti kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, menelaah, dan menginterpretasikan objek kurikulum PAUD yang dibagi dalam enam kategori: 1) rasional pengembangan, 2) landasan pengembangan, 3) strategi dan prosedur pengembangan, 4) struktur dan isi kurikulum, 5) strategi implementasi, dan 6) buku dan peralatan.

Metode Penelitian

Penelitian yang didasarkan pada pemahaman masyarakat terhadap rancangan kurikulum PAUD yang sedang diimplementasikan ini menganut pendekatan penelitian studi kasus yang menggunakan paradigma penelitian *positivistik*. Model penelitian studi kasus ini secara umum ditandai dengan penggunaan kajian literatur atau teori pada penelitiannya (Stake, 2005; Creswell, 2007; Yin 2009). Dengan demikian, tidak ada teknik sampling secara khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu berusaha mengungkap gambaran pemahaman masyarakat secara cermat terhadap suatu objek kurikulum yang sedang diterapkan. Secara konseptual hasil penelitian akan mendeskripsikan fakta/informasi yang terjadi pada saat itu (Sax, 1979; Sudjana & Ibrahim 1989). Model pendeskripsian data, juga merujuk pendapat Crawl (1996), yang

menyatakan deskriptif adalah gambaran hasil telaahan, dan interpretasi dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi objek data dari lapangan sehingga diperoleh informasi secara keseluruhan.

Untuk memperoleh data dan informasi secara komprehensif, teknik diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan masyarakat dilakukan di tiga daerah, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Tiga daerah tersebut diambil dengan pertimbangan: 1) keterjangkauan peneliti, 2) adanya APK PAUD tahun 2012/2013 yang cenderung naik untuk Kota Pangkal Pinang sebesar 65,42%, Kota Balikpapan 49,93%, dan Kabupaten Bengkulu Tengah 52,04%, dan 3) angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun yang tinggi, yaitu untuk Kota Pangkal Pinang sebesar 99,63%, Kota Balikpapan 98,78%, dan Kabupaten Bengkulu Tengah 84,20% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Pengumpulan data dilakukan antara bulan September hingga November 2014. Di setiap daerah diambil 3 PAUD dengan kriteria satu di kota, satu di pinggiran kota, dan satu di desa. Setiap PAUD diambil 12 orang anggota masyarakat sebagai responden. Dengan demikian, jumlah responden sebanyak 108 orang. Latar belakang responden cukup beragam, seperti orangtua peserta didik, pengurus komite sekolah, tokoh masyarakat, pemimpin formal seperti ketua RT, ketua RW hingga kepala desa, dan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Pada setiap PAUD komposisi masyarakatnya juga tidak berpola.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil FGD ke dalam komponen-komponen objek kurikulum dengan cara mengolah data transkrip. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif sederhana dalam bentuk naratif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa penelitian ini ingin memperoleh gambaran terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kurikulum PAUD ditinjau dari enam kategori. Karena itu, pendeskripsian hasil dan pembahasan berikut menyoroti satu-persatu dari setiap kategori dimaksud.

Pertama, rasional pengembangan kurikulum. Ditinjau dari sudut pandang pendidikan, semua responden mempersepsi dengan kuat bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting. Penting, karena menurut hampir semua responden menyatakan bahwa pengembang kurikulum PAUD pasti telah mempertimbangkan rasional yang tidak sembarangan, bukan kebalikannya irasional. Dengan demikian, keberhasilan maupun ketidakberhasilan PAUD dapat dikontrol lewat indikator-indikator rasionalitas ketercapaian yang terdapat dalam kurikulum. Hasil FGD juga menyimpulkan, bahwa penyusunan kurikulum harus dikerjakan dengan penuh hati-hati, dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, dan atas dasar pertimbangan rasional yang kuat. Oleh karena itu, kurikulum harus sesuai dengan usia anak, tuntutan dan tantangan zaman. Banyaknya permainan *game*, mudahnya akses internet, penggunaan telepon genggam, acara televisi, disinyalir mempengaruhi tumbuh-kembang anak di zaman sekarang ini. Kebutuhan masyarakat akan perilaku yang agamis merupakan tantangan bagi kurikulum. Di samping itu, sebagian besar responden juga melontarkan pemikiran bagaimana agar perilaku anak yang cenderung malas belajar bisa dikikis dalam kurikulum. Menurut mereka, dalam kurikulum perlu dimasukkan norma, aturan, dan nilai-nilai sehingga anak-anak menjadi terbiasa rajin belajar dan rajin bekerja, bukan sebaliknya hanya rajin menonton televisi dan gemar “hidup” di luar rumah bermain bersama dengan teman-temannya. Dengan demikian, rasionalitas pijakan pengembangan kurikulum PAUD mesti jelas dan lugas.

Kedua, landasan pengembangan kurikulum. Hasil FGD menyimpulkan bahwa masyarakat umumnya mempersepsi pentingnya landasan pengembangan kurikulum. Menurut mereka, untuk membangun rumah membutuhkan landasan atau fondasi yang kokoh. Apalagi kurikulum untuk masa depan anak, kurikulum harus kokoh dan kuat, berarti tidak mudah digoyahkan oleh budaya lain dan kuat dalam arti mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut hampir semua responden, satu hal yang sebaiknya dijadikan landasan pengembangan kurikulum PAUD adalah apa yang sudah dimiliki. Dengan lugas, responden umumnya menyampaikan bahwa banyak sekali landasan dan sumber daya yang dimiliki, misalnya Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia yang menjadi sumber utama dan penentu arah, undang-undang dasar negara, sumber daya yang bisa diandalkan, prinsip sebagai bangsa yang harus beragama, kaya dengan aneka ragam suku, ras, golongan, dan budaya dan tujuan pendidikan nasional, serta anak-anak yang mempunyai potensi untuk berkembang. Semua potensi tersebut layak dijadikan landasan pengembangan kurikulum PAUD.

Ketiga, strategi dan prosedur pengembangan kurikulum. Hasil FGD menunjukkan bahwa hampir semua responden memberi persepsi tanggapan yang lebih kurang sama, bahwa jangankan mengembangkan kurikulum yang sifatnya amat vital untuk masa depan bangsa, melaksanakan urusan di lingkungan RT memerlukan strategi khusus dan membutuhkan prosedur kerja yang jelas. Karena itu, responden umumnya memahami dan meyakini bahwa kurikulum PAUD yang telah dihasilkan oleh Kemdikbud sudah pasti menggunakan strategi khusus dan prosedur kerja yang jelas, seperti melalui seminar, diskusi yang melibatkan berbagai pakar, dan *workshop* penyusunan yang dilakukan oleh tim profesional. Tim tersebut memiliki otoritas manajemen yang mampu mengaktifkan partisipasi seluruh unsur yang terlibat dan mampu melakukan koordinasi yang

sinergi antarpemangku kepentingan. Sebagian besar responden yang berada di lapangan sebagai pengguna kurikulum sebenarnya tidak begitu paham tentang strategi yang ditempuh dan prosedur yang dilaksanakan para pengembang kurikulum. Bagi masyarakat yang penting adalah kurikulumnya baik dan sesuai dengan keinginan. Masyarakat cukup ikut berperan di ranah penerapan sebagai masyarakat pembelajar. Merujuk hasil penelitian, Winton (2000) menyarankan bahwa dukungan publik akar rumput (masyarakat) untuk intervensi pada anak usia dini dapat dicapai melalui semacam "komunitas belajar".

Keempat, struktur dan isi kurikulum. Dari hasil FGD yang didapat di tiga daerah sampel, persepsi masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa yang dimaksud struktur dan isi kurikulum adalah materi-materi yang diajarkan kepada anak-anak di PAUD, yaitu 1) program kegiatan belajar secara keseluruhan seperti latihan menulis, membaca, berbahasa, berteman, makan dan minum bersama, berdisiplin, bersopan santun dan bertata krama; 2) kegiatan ibadah keagamaan, seperti latihan sholat, berdoa, mengaji; dan 3) kegiatan bermain, bernyanyi, menari, baris-berbaris, serta berolahraga. Materi-materi tersebut menurut sebagian besar masyarakat mesti dijadwalkan secara baik, terstruktur secara baik atau dengan kata lain diorganisasikan secara baik. Hampir semua responden juga mempersepsi bahwa isi suatu kurikulum PAUD amat penting dan strategis karena menurut sebagian besar masyarakat isi kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak, baik di kota, pinggiran kota, maupun di desa. Perkembangan yang dimaksud, antara lain mencakup: 1) mempersiapkan anak-anak masuk sekolah dasar, 2) membantu mempersiapkan anak-anak beradaptasi secara kreatif dengan lingkungan, teman dan kehidupannya, dan 3) membantu anak-anak untuk bertingkah laku, bertutur kata, bertata krama serta bersopan santun layaknya anak Indonesia.

Kelima, strategi implementasi. Untuk dimensi ini, persepsi semua responden lebih kurang sama, yaitu sepakat tidak ada jalan lain bahwa strategi pengimplementasian kurikulum PAUD sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, lebih-lebih peran dinas pendidikan kabupaten/kota agar mau saling bersinergi, bahu-membahu mensukseskan penyelenggaraan kurikulum PAUD. Ukuran sukses menurut persepsi masyarakat, umumnya bukan gedung sekolah bagus yang dilengkapi dengan sarana pendingin udara, tetapi lembaga itu memiliki luas ruang belajar yang cukup, luas halaman sekolah cukup, tempat bermain cukup, alat-alat permainan dengan beragam model cukup, memiliki sarana air bersih, memiliki kamar mandi dan WC yang bersih, dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional serta iurannya tidak memberatkan warga (tidak mahal). Menurut masyarakat, pada umumnya kurikulum PAUD yang diimplementasikan menjadi dambaan masyarakat sekitar karena dianggap akan mampu menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran yang baik dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, yang pada gilirannya PAUD tersebut akan menjadi kebanggaan warganya. Di samping itu, masyarakat umumnya meyakini bahwa tanpa peran serta mereka tidak mungkin kurikulum PAUD akan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, hampir semua responden menyatakan bahwa sepanjang masyarakat berada di daerah itu strategi pengimplementasian kurikulum PAUD selalu melibatkan orang tua anak dan masyarakat, minimal dalam pendanaan. Persepsi masyarakat seperti itu diperkuat oleh hasil penelitian Hopkins, Jen, Ayuba, & Rachel, (2014) yang menunjukkan bahwa walaupun dari latar belakang budaya yang berbeda, adanya faktor geografis masyarakat tetap berinteraksi dalam komunitas dan memiliki komitmen mempengaruhi pengambilan keputusan mereka terhadap akses layanan anak usia dini.

Keenam, buku dan peralatan. Terkait dengan buku dan peralatan, semua responden

mempersepsi bahwa kedua komponen itu bukan bagian dari kurikulum. Persepsi mereka, kurikulum adalah panduan berisi materi yang akan diajarkan, sementara buku dan peralatan merupakan bagian pelengkap untuk mendukung mengajarkan materi yang terdapat di dalam kurikulum. Akan tetapi setelah diberi sedikit penjelasan tentang posisi buku dan peralatan dalam kurikulum, akhirnya masyarakat umumnya cukup memahaminya. Pentingnya buku dan peralatan bermain di lembaga PAUD, menurut persepsi sebagian besar responden menempati urutan ketiga setelah kurikulum dan guru. Hal demikian diperkuat hasil dari FGD, yang umumnya berisi harapan masyarakat terhadap buku dan peralatan, yang menyatakan sebaiknya pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah melengkapi kebutuhan buku dan peralatan bagi PAUD secara standar seperti pada Kurikulum 2013, di mana semua siswa diberi buku secara gratis oleh pemerintah. Menurut sebagian besar masyarakat, tanpa ada peran pemerintah seperti itu maka yang terjadi hanyalah ketimpangan-ketimpangan dalam melaksanakan kurikulum PAUD. Ada lembaga PAUD yang terbina dengan sangat baik karena masyarakatnya kaya sehingga mampu memberi sumbangan pembinaan pendidikan yang mahal, di mana salah satu peruntukannya adalah untuk membeli buku-buku dan peralatan pendidikan yang lengkap. Sementara itu, PAUD di desa yang umumnya dimiliki oleh masyarakat berbasis buruh perkebunan, petani kecil, hidup berladang, pengrajin batu bata dengan status sosial ekonomi lemah jelas tidak mungkin untuk ditarik iuran yang mahal sebagai sarana untuk pengadaan buku dan peralatan.

Pembahasan

Hasil temuan tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat dengan berbagai ragam profesi dan latar belakang, baik di kota, pinggiran kota maupun di desa memiliki persepsi yang cukup baik terhadap rasional pengembangan kurikulum PAUD. Gambaran itu sekaligus menandakan bahwa masyarakat pendukung

keberadaan PAUD memiliki kepekaan akan arti dan pentingnya rasional mengapa kurikulum perlu disusun. Begitu pula, berbagai tuntutan dan tantangan zaman yang dihadapi, baik tuntutan dan tantangan di dalam masyarakat maupun tuntutan dan tantangan di luar masyarakat juga penting dipertimbangkan sebagai rasional dalam mengembangkan kurikulum. Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan filosofi dan strategi pembelajaran yang menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan masyarakat, antara lain, norma, nilai, kebiasaan dengan apa yang dihasilkan oleh kurikulum. Hal itu diperkuat oleh hasil penelitian Ogawa, Judith, Marilyn, dan Samantha (2003) terhadap pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis standar pada suatu daerah distrik yang menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis standar di tingkat kabupaten sebaiknya menganut pendekatan rasionalistik yang tegas, filosofis pembelajaran yang jelas, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan standar negara.

Persepsi masyarakat yang terungkap terkait dengan rasional pengembangan kurikulum, juga memberi gambaran yang cukup signifikan, bahwa masyarakat baik di kota, di pinggiran kota maupun di desa yang peduli dengan tumbuh kembangnya PAUD, meyakini kalau pengembangan kurikulum yang saat ini dipakai di sekolah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek landasan, seperti yuridis (minimal UURI tentang Sisdiknas), filosofis (Pancasila, misalnya), sosiologis, teoritis, dan empiris. Adanya persepsi keyakinan masyarakat seperti itu, sekaligus juga memberi gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan bahwa walaupun masyarakat Indonesia berada di desa sekalipun yang nota bene jauh dari peradaban moderen memiliki keyakinan bahwa negara, pemerintah daerah, keberadaan pemimpin di daerah, berbagai perangkat kebijakan (termasuk kurikulum), keberadaan sebuah sekolah pada saat diadakan pasti ada rasionalitas landasannya. Anggapan seperti itu, sejalan dengan

hasil penelitian kebijakan kurikulum di Australia Selatan oleh Collins dan Yates (2009) yang menemukan tiga hal sebagai pertimbangan landasannya, yaitu 1) memprioritaskan keadilan sosial, 2) fokus pada pengembangan siswa secara individu, dan 3) adanya ketentuan alternatif untuk mata pelajaran akademik sebagai dasar intinya. Dari sini, jelas bahwa masyarakat pendukung keberlanjutan PAUD memiliki persepsi yang cukup baik terhadap landasan-landasan yang dipakai sebagai dasar pengembangan kurikulum, bahkan mereka amat meyakinkannya.

Begitu pula temuan berkait dengan strategi dan prosedur pengembangan kurikulum, dapat dimaknai bahwa persepsi masyarakat baik yang ada di kota, pinggiran kota maupun di desa sebenarnya tidak terlalu menghiraukan strategi dan prosedur seperti apa yang ditempuh oleh para pengembang kurikulum di pusat. Bagi masyarakat, yang penting kurikulum PAUD yang dihasilkan memenuhi harapan masyarakat penggunaannya. Anak-anak yang bersekolah menjadi lebih baik, lebih rajin, lebih sopan, dan lebih mengenal masyarakatnya. Walau persepsi masyarakat biasa-biasa saja, hal ini menandakan bahwa strategi dan prosedur pengembangan kurikulum dapat dimaknai memang penting, tetapi masyarakat menganggap ada yang lebih penting, yaitu bagaimana masyarakat yang tinggal di desa yang secara geografis jauh dari Jakarta bisa merasakan terlibat dalam pengembangan kurikulum PAUD. Keinginan sebagian responden untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum sebenarnya juga merupakan keinginan hampir semua warga negara. Studi Rosen (2010) tentang persepsi anak-anak terhadap peran mereka dalam pengembangan kurikulum dalam satu prasekolah Kanada, misalnya bisa dijadikan renungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak merasa berperan aktif dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan, tetapi guru membuat keputusan akhir tentang isi kurikulum. Anak-anak menyatakan keinginan untuk mempengaruhi kurikulum dengan cara baru,

tetapi kemampuan mereka untuk melakukannya dibatasi oleh faktor-faktor struktural dalam dan di luar prasekolah. Temuan studi ini sekaligus juga memberi gambaran bahwa keterlibatan semua warga masyarakat dalam pengembangan kurikulum PAUD merupakan kemustahilan.

Persepsi masyarakat mengenai isi kurikulum yang harus dijadwalkan, terstruktur, dan diorganisasikan secara baik memberi makna bahwa masyarakat dalam hal pengimplementasian kurikulum PAUD bukan hanya sebatas terlibat dalam hal pendanaan tetapi juga ingin memperoleh pencerahan lebih mendalam tentang struktur dan isi kurikulum. Walaupun pada akhirnya masyarakat juga menyadari bahwa keinginan yang seperti itu merupakan ketidaklaziman. Persepsi harapan seperti temuan studi ini menandakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap konsep dasar filosofis dan keilmuan kurikulum serta ilmu bantu lainnya sebagai salah satu dasar pengembangan komponen kurikulum PAUD menjadi modal dasar yang baik untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tersebut di kemudian hari. Persepsi masyarakat yang positif tersebut karena mereka berkepentingan terhadap tumbuh kembangnya anak-anak paling tidak dari lima sisi, yaitu 1) pengembangan potensi diri, 2) penanaman dasar-dasar aqidah keimanan, 3) pembentukan dan pembiasaan perilaku sosial-emosional yang diharapkan, 4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan, dan 5) pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif. Kelima fungsi dasar pendidikan untuk anak usia dini yang diinginkan oleh masyarakat sejalan dengan temuan dari penelitian Heo, Cheatham, Mary, dan Jina (2014) yang menunjukkan bahwa banyak pendidik atau guru anak usia dini di Korea menyadari pentingnya strategi pengajaran sosial-emosional, tetapi mereka melaporkan rendahnya tingkat pelaksanaan yang spesifik tentang strategi sosial-emosional.

Dimensi strategi implementasi kurikulum PAUD dipersepsi amat signifikan oleh semua responden. Artinya, masyarakat sangat

mendukung bahwa seperangkat kurikulum untuk kegiatan belajar mengajar bagi anak usia dini hendaknya sengaja dilaksanakan secara baik melalui berbagai ragam aktivitas dan permainan yang bisa dilakukan untuk dapat menyiapkan anak-anak meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri lebih lanjut. Perkembangan diri yang dimaksud terutama pada aspek baik estetika, kognitif, emosional, bahasa, fisik dan sosial maupun religiositas/keagamaan sehingga dapat menyediakan pengalaman yang dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (sekolah dasar). Arah pengimplementasian kurikulum PAUD seperti itu diperkuat oleh studi Alasuutari and Alasuutari (2012) bahwa bentuk yang sebenarnya dari praktik-praktik baru pelaksanaan rencana pendidikan anak usia dini tidak boleh keliru dengan efek dari tradisi nasional. Hasil studi tersebut memberikan gambaran bahwa tujuan reformasi PAUD di Finlandia tidak boleh membingungkan masyarakat, terutama dalam hal praktik kurikulum yang sebenarnya.

Persepsi masyarakat tentang keberadaan buku dan peralatan pendidikan untuk PAUD bukan bagian dari kurikulum merupakan kelaziman karena selama ini stigma masyarakat kurikulum adalah dokumen sementara buku dan peralatan merupakan kelengkapan untuk penerapan dokumen. Dengan demikian, apabila bicara mengenai kedua hal tersebut biasanya masyarakat mengaitkan dengan tarikan uang, yakni sebagian untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan sebagian lagi adalah untuk membeli buku-buku. Sementara peralatan dan perangkat bermain dianggap bagian dari kelengkapan sekolah. Persepsi masyarakat seperti ini, dapat dimaknai bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD seyogyanya dilengkapi dengan buku-buku dan peralatan bermain yang cukup, seperti kebijakan pada saat pemerintah menerapkan Kurikulum 2013. Persepsi masyarakat bahwa dua komponen, yaitu buku dan peralatan amat penting karena kehidupan anak-anak secara naluriah aktif bergerak, ingin membaca, ingin

bermain-main dengan alat-alat dan dengan kecenderungan itu anak menggali berbagai pengalaman kesehariannya baik di ruangan kelas, di tempat bermain, di halaman sekolah dan di lingkungan sekolahnya secara lebih luas. Dengan adanya buku dan peralatan untuk bermain pembelajaran yang representatif, anak-anak secara aktif akan belajar dari hasil pengamatan dan partisipasinya terhadap lingkungan. Melalui pengamatan dan pengalaman langsung, anak-anak aktif membangun berbagai pemahaman dan pengetahuan sesuai dengan apa yang dipersepsinya. Dengan demikian, buku-buku memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan bahasa pada anak-anak. Rujukan seperti itu, diperkuat oleh temuan studi dari Scarinci, Tanya, Jerrine, dan Kylie (2015) tentang model wicara-bahasa (SLPs), yaitu suatu model percontohan terhadap anak usia dini menunjukkan bahwa program pendidikan *in-service* tersebut mengingatkan akan pentingnya peran PAUD dalam memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap keberadaan buku dan peralatan bermain dalam konteks kurikulum merupakan kemutlakan, sebab anak usia dini haruslah menikmati masa kanak-kanaknya dengan banyak membaca buku dan bermain.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa isu mengenai kurikulum PAUD dan pengimplementasiannya oleh masyarakat tidak hanya ranah pengembang kurikulum melainkan juga secara cukup signifikan oleh masyarakat. Pertama, masyarakat mempersepsi penting terhadap rasional pengembangan, landasan pengembangan, strategi dan prosedur pengembangan, struktur dan isi kurikulum, strategi implementasi, dan keberadaan buku dan peralatan dalam konteks desain kurikulum PAUD. Kedua, dengan adanya kurikulum PAUD yang dikembangkan, masyarakat mempersepsi secara

kuat bahwa dokumen tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan untuk tumbuhkembangnya anak usia dini dalam berlatih membaca, menulis, berbahasa, bersosialisasi/berteman, makan dan minum bersama, berdisiplin, bertata krama, sopan santun, aqidah keimanan, dan kegiatan bermain, bernyanyi, baris-berbaris, serta berolahraga. Ketiga, pengimplementasian kurikulum dipersepsi oleh masyarakat sangat memerlukan kerja sama yang harmoni antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pembina pendidikan di daerah terutama dalam hal tenaga pendidik, pengadaan buku, peralatan, serta sumber daya pendukung lainnya.

Saran

Dari hasil penelitian yang didapat di tiga daerah, tampak masyarakat yang peduli terhadap PAUD memahami secara positif keberadaan kurikulum. Namun, kenyataan yang ada pengimplementasian kurikulum masih sarat masalah, terutama dalam hal sumber daya tenaga pendidik yang masih belum memadai. Oleh karena itu, pertama, kebijakan pusat sampai ke tingkat provinsi, hingga menghunjam sampai ke kabupaten/kota hendaknya bukan sekadar pencaangan satu desa satu PAUD tetapi benar-benar mengadakan gerakan aksi untuk mencari dan memfasilitasi penyebab macetnya implementasi kebijakan penerapan kurikulum. Kedua, kurikulum PAUD hendaknya dimaknai oleh semua pemangku kepentingan pendidikan sebagai instrumen pemerintah yang vital, yakni untuk pembentukan kepribadian yang berdaulat, beradab, berbudaya dan mandiri sejak dini. Oleh karena itu, pembinaan lembaga PAUD dari berbagai aspek perlu lebih ditingkatkan. Ketiga, penerapan kurikulum PAUD di sekolah harus dimaknai sebagai wahana pembiasaan dan pembudayaan norma, nilai-nilai dan tata kelakuan yang sarat dengan muatan kearifan lokal dan budaya nasional sebagai jati diri bangsa.

Pustaka Acuan

- Ahmadi, A. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alasuutari, P & Alasuutari, M. 2012. The Domestication of Early Childhood Education Plans in Finland. *Global Social Policy*, 12 (2), hlm. 129-148.
- Berita Satu. 10 Maret 2014. *BKKBN: PAUD Baru Jangkau 30% Anak Usia 0-6 Tahun di Indonesia*. <http://www.beritasatu.com/kesra/170558-bkkbn-paud-baru-jangkau-30-anak-usia-06-tahun-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 26 Januari 2015.
- Bredekamp, S. & C. Copple. 1997. *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington: NAEYC.
- Chaplin, J. P. 1989. *Kamus Lengkap Psikologi*. Penerjemah Kartini-Kartono. Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Rajawali.
- Collins, C., & Yates, L. 2009. Curriculum Policy in South Australia since the 1970s: The Quest for Commonality. *Australian Journal of Education*, 53 (2), hlm. 125-140.
- Creswell, J. W. 2007. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* Third edition. New Jersey: Pearson.
- Crowl, T. K. 1996. *Fundamentals of Educational Research* (2nd ed.). Chicago: Brown & Benchmark Publishers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Gamble, A. 1988. *An Introduction to Modern Social and Political Thought*. Hongkong: Macmillan Education Ltd.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Heo, K. H. G., Cheatham, A., Mary, L. H., & Jina, N. 2014. Korean Early Childhood Educators' Perceptions of Importance and Implementation of Strategies to Address Young Children's Social-Emotional Competence. *Journal of Early Intervention*, 36 (1), hlm. 49-66.
- Hopkins, L., Jen L., Ayuba, I., & Rachel, P. 2014. How Does 'Community' Facilitate Early Childhood Service Use in a multicultural Australian suburb?. *Journal of Early Childhood Research*, 1476718X14552876.
- http://www.jurnas.com/news/114685/Wujudkan_Target_Satu_Desa_Satu_PAUD_2013/1/Sosial_Budaya/Pendidikan#sthash.HKJMtQXD.dpuf. Diakses tanggal 27 Januari 2015.
- Jenkins, J. M. 2014. Early Childhood Development as Economic Development: Considerations for State-Level Policy Innovation and Experimentation. *Economic Development Quarterly*, 28 (2), hlm. 147-165.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *APK/APM PAUD, SD, SMP, SM dan PT (termasuk madrasah dan sederajat) Tahun 2012/2013*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud 2013.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, P, & Keller, K. L. 2005. *Marketing Management*. 12th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Maclonis, J. 1997. *Seeing Ourselves: Classic, Contemporar, and Cross-Cultural Reading in Sociology*. New Jersey: Prentice Hall College Div.

- Maliki, Z. 2008. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ogawa, R. T., Judith, H. S., Marilyn, M. F., & Samantha, P. S. 2003. The Substantive and Symbolic Consequences of a District's Standards-Based Curriculum. *American Educational Research Journal*. 40 (1), hlm. 147-176.
- Rakhmat, J. 2007. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Richeimer, J. 2006. Familiarity and the Inferential Theory of Perception. *Theory & Psychology*, August 2006. 16 (4), hlm. 505-525.
- Rosen, R. 2010. We Got Our Heads Together and Came Up with a Plan: Young Children's Perceptions of Curriculum Development in One Canadian Preschool. *Journal of Early Childhood Research*. 8 (1), hlm. 89-108.
- Sax, G. 1979. *Foundations of Educational Research*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Scarinci, N., Tanya, R., Jerrine, P., & Kylie, W. 2015. Impacts of an in-Service Education Program on Promoting Language Development in Young Children: A Pilot Study with Early Childhood Educators. *Child Language Teaching and Therapy*. 31 (1), hlm. 37-51.
- Schaefer, R. T., & Robert, P. L. 1998. *Sociology*. New York: McGraw-Hill Education.
- Sudjana, N. & Ibrahim. R. 1989. *Penelitian & Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugihartono, Kartika N. F, Farida A. S., Farida H., & Siti R. N. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Stake, R. E. 2005. *Multiple Case Study Analysis*. New York: Guilford Press.
- Waidi. 2006. *The Art of Re-engineering Your Mind for Success*. Jakarta: Gramedia.
- Walgito, B. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi offset.
- Waters, M. 1994. *Modern Sociological Theory*. London-New Delhi: Sage Publications, Thousand Oaks, tbk.
- Winton, P. J. 2000. Early Childhood Intervention Personnel Preparation: Backward Mapping for Future Planning. *Topics in Early Childhood Special Education*. 20 (2), hlm. 87-94.
- Yin, R. K. 2009. *Case Study Research, Design and Methods* (Third Edition). London-New Delhi: Sage Publications, Thousand Oaks.

